

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan wabah yang membawa dampak yang sangat besar bagi dunia saat ini. Virus ini awalnya muncul di Provinsi Wuhan Negara China (Tiongkok) yang menyebar luas hingga ke Indonesia. Sudah tujuh bulan terakhir Covid-19 melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Dampak dari pandemi juga menghambat proses pembangunan di beberapa Negara termasuk Indonesia baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar dalam proses pembangunan di beberapa daerah khususnya provinsi Aceh. Maka kebijakan pemerintah dalam memodifikasi tata pengelolaan pemerintahan dalam segala aspek.

Karena berbicara pelaksanaan pembangunan pasti adanya kontak langsung antar manusia dalam melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan tersebut. Proses pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 sangat riskan karena setiap orang mau tidak mau harus melakukan kontak fisik dalam menyelesaikannya. Hal ini yang menyebabkan proses implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal dilakukan oleh pemerintah akibat dari diberlakukannya protokol kesehatan untuk menghindari wabah virus tersebut.

Kejadian munculnya pandemi virus corona mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan diluar rumah. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan manusia, lebih dari itu, dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat luar biasa hingga merambah kesegala lini, mulai

dari sektor ekonomi, sumber daya manusia dan lainnya. Hampir seluruh Negara didunia mengalami kerugian yang luar biasa diakibatkan covid-19. Kebanyakan dari Negara yang terdampak adalah dari sektor ekonomi, dimana pendapatan Negara menurun, sehingga banyak Negara yang nilai mata uangnya menurun atau terjadi Inflasi yang luar biasa.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkena dampak yang cukup signifikan diakibatkan pandemi covid-19, bayangkan saja, belum pun virus ini masuk ke Indonesia, perekonomian Indonesia ditingkat global sudah mulai terganggu, dimulai dengan anjloknya mata uang rupiah hingga mencapai titik terendah yaitu Rp.16.000-_, dan turunnya cadangan devisa Negara. Selain Negara secara nasional, banyak daerah dari berbagai provinsi yang cukup merasakan imbas dari pada covid-19. Mayoritas penduduk yang pemasukannya berkurang selama pandemi, banyak juga yang tidak produktif lagi diakibatkan terbatasnya jarak selama covid-19 dan aktivitas pembangunan tidak semaksimal seperti sebelum datangnya virus ini. Banyak kegiatan yang harusnya dikerjakan kemudian menjadi terhambat dikarenakan virus covid-19 (*Sumber; Ekonom UNS: Nilai Tukar Rupiah Anjlok Akibat Covid-19 - Ekonomi Bisnis.com.*)

Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak buruk adalah provinsi Aceh, tepatnya di pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terkena imbas nya. Tentunya dalam hal ini keberagaman kebijakan harus dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang baik ditengah masa pandemi covid-19. Bupati dalam hal ini dalam mengeluarkan perubahan kebijakan dalam tatanan pemerintahan harus bisa menjadikan sebuah perubahan yang tetap menghadirkan iklim yang baik.

Pembangunan dimasa pandemi covid-19 mengalami kesulitan karena sedikit banyaknya harus bisa memangkas anggaran yang sudah masuk kedalam program pembangunan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna membantu masyarakat disituasi pandemi covid-19 seperti ini dan secara tidak langsung pembangunan yang sudah direncanakan mengalami stagnansi dan memperlambat proses pembangunan di setiap Desa tentunya akan berdampak pada proses pembangunan di 24 Kecamatan, 59 Mukim dan 513 Gampong dan kesejahteraan masyarakatnya akibat daripada perubahan kebijakan Bupati Aceh Timur, beberapa program-program yang kemudian terkena dampak baik dari sektor fisik maupun non fisik yang kemudia menghambat kemajuan Desa.

Tentunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh Timur yakni bupati langsung akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pelayanan yang diharapkan masyarakat dalam mengakses keperluan masyarakat terhadap aktivitas sehari-hari. Jangan sampai perubahan yang dilakukan oleh bupati Aceh Timur menghadirkan sesat pikiran yang akan menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Perubahan kebijakan Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan pemerintah di masa pandemi covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perubahan kebijakan Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan Pemerintah di masa pandemi covid-19 ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan Pemerintah di masa pandemi covid-19?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus kajian penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan Pemerintah di masa pandemi covid-19.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan Pemerintah di masa pandemi covid-19

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian penulis maka tujuan penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar mengetahui apa saja Perubahan kebijakan Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan Pemerintah di masa pandemi covid-19.
2. Agar mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bupati Aceh Timur dalam pengelolaan Pemerintah di masa pandemi covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan dari penulisan proposal ini maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan masukan yang dapat dari sumber informasi bagi disiplinnya ilmu Politik, terutama pada bidang perubahan kebijakan dimasa pandemi covid-19.

2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perubahan kebijakan dimasa pandemi covid-19.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan elit politik mengenai perubahan kebijakan dimasa pandemi covid-19.
2. Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pembaca, pengamat politik, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini mengenai kebijakan dimasa pandemi covid-19.